

BAB I

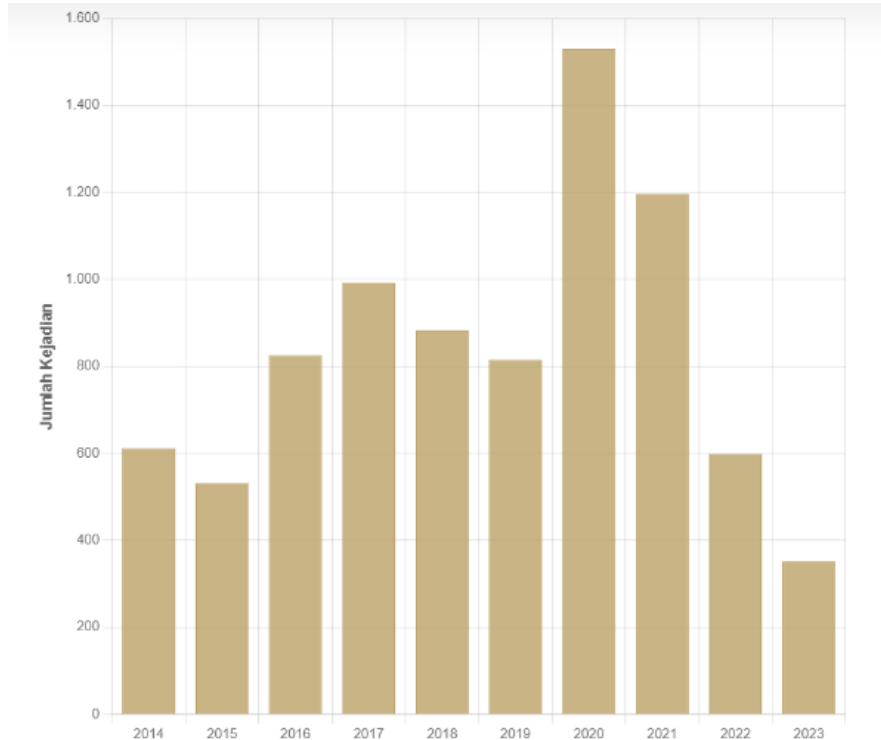
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik sehingga rawan terhadap bencana (Basuki, 2019). Berbagai bencana alam, termasuk banjir, sering terjadi di Indonesia (Madani et al., 2022). Banjir ini merupakan bencana alam yang melanda wilayah yang dialiri sungai dengan jumlah yang cukup banyak (Madani et al., 2022). Banjir merupakan kondisi di mana air meluas di suatu daerah sehingga menutupi permukaan tanah di wilayah tersebut (Muhammad & Aziz, 2020). Banjir membawa kerusakan serta mengganggu jalannya aktivitas ekonomi dan sosial (Faiza et al., 2022). Banjir ini adalah yang pertama dalam skala global dan menyebabkan 55% dari semua bencana serta 38% di Indonesia. Banjir menimbulkan banyak kerugian baik secara materil (harta benda) maupun moral (psikologis) (Romadhan et al., 2023) oleh sebab itu pemerintah merencanakan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi bencana sebelum dan sesudah bencana benar-benar terjadi (Arfani, 2022).

Banjir sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan yang tinggi, penebangan hutan yang tidak terkendali, dan sebagainya. Banjir adalah fenomena alam yang bisa berdampak serius bagi manusia dan lingkungan. Banjir bisa membahayakan kehidupan warga dengan menyebabkan kerugian secara finansial, merusak infrastruktur dan pemukiman, serta mendatangkan kerugian ekonomi serta sosial yang berarti bagi masyarakat. Selain itu, banjir juga bisa mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Gambar 1.1
Statistik Banjir 10 Tahun Terakhir di Indonesia (2014-2023)



Sumber : (BNPB, 2024)

Berdasarkan gambar 1.1 menurut data statistik dari BNPB, telah tercatat 8.333 kejadian banjir di Indonesia mulai dari tahun 2014 hingga 2023. Walaupun fenomena tersebut mengalami perkembangan dinamis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, namun terlihat bahwa angka kejadian banjir dari tahun 2015 hingga 2020 terus meningkat. Peningkatan terjadi setelah tahun 2019. Tahun 2020 mencatatkan rekor tinggi dalam jumlah banjir di Indonesia, mencapai 1.531 kejadian banjir. Namun demikian, meskipun statistik banjir menunjukkan penurunan sejak 2021, kerusakan yang diakibatkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah kejadian banjir terendah tercatat pada tahun 2023, dengan hanya terjadi 351 kasus.

Tabel 1.1

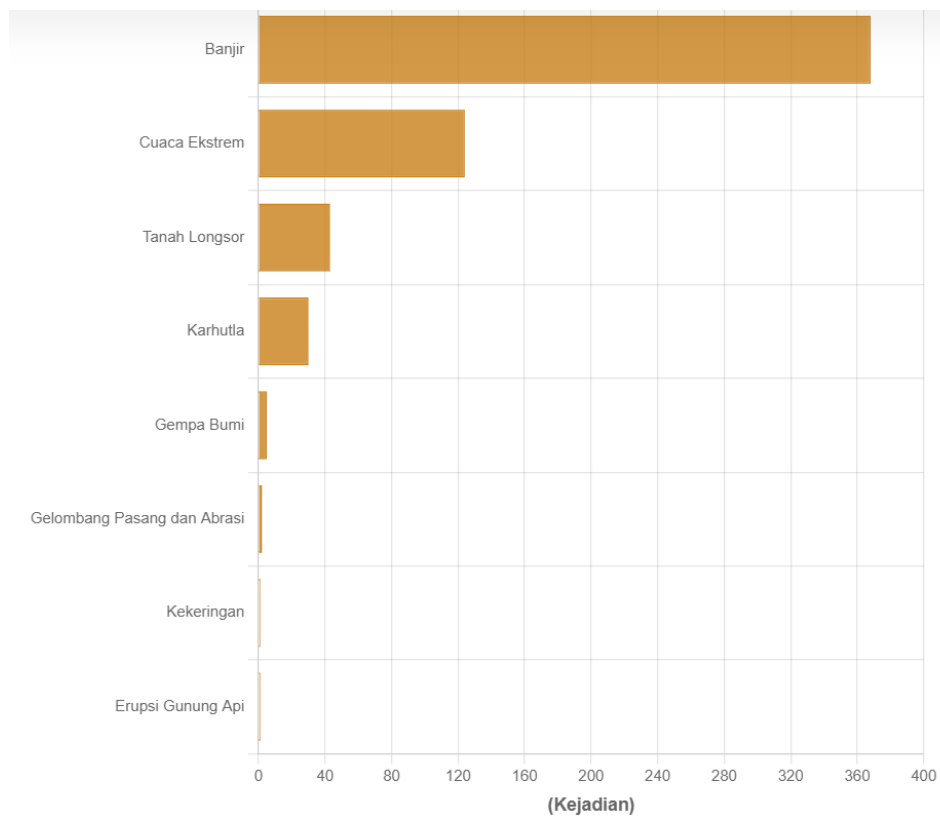
Kerugian Banjir di Indonesia Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Korban Meninggal	Jumlah Korban	Kerusakan Rumah	Kerusakan Sekolah	Kerusakan Tempat Ibadah
2020	132	3.843.714	28.824	511	625
2021	337	4.273.938	98.717	913	818

Sumber : Olah Data Peneliti, 2024

Gambar 1.2

Jumlah Bencana Alam di Indonesia (1 Januari-2 April 2024)

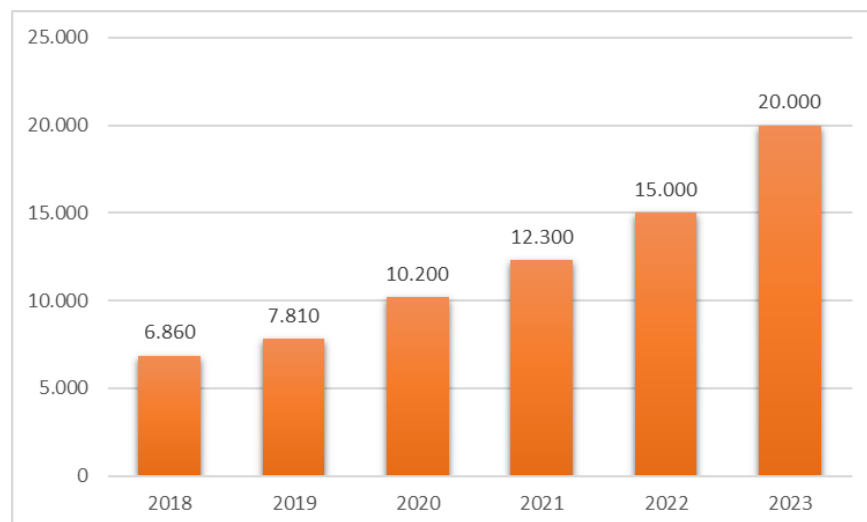


Sumber : (BNPB, 2024)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah kejadian bencana sebanyak 574 pada tahun 2024 hingga awal bulan April. Banjir sering terjadi dan telah mencatat 368 kejadian. Pada peringkat kedua, terdapat kondisi cuaca ekstrem yang telah dicatat sebanyak 124 kejadian. Longsor menempati posisi ketiga dengan 43 kejadian. Di samping itu, tercatat 30 insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 2 episod pasang surut dan erosi, 5 kejadian getaran bumi, 1 peristiwa kekeringan, dan 1 kali gunung berapi meletus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengindikasikan bahwa tsunami diperkirakan akan terjadi pada bulan April 2024. Tengah tahun 2024 telah tiba pada bulan Mei, menandakan bahwa Indonesia telah mengalami tingkat banjir yang cukup signifikan dalam beberapa bulan belakangan ini.

Gambar 1.3

Perkembangan Publikasi *Collaborative Governance* di Indonesia

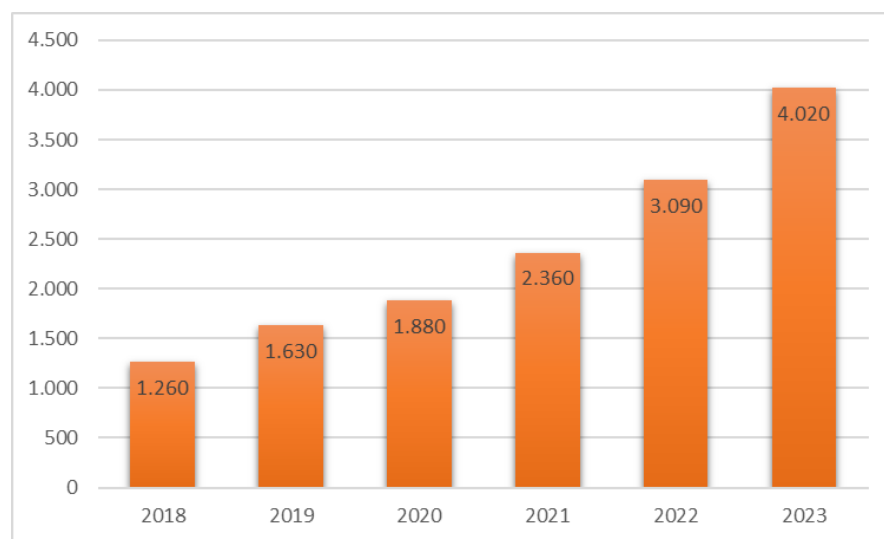


Sumber : Olah Peneliti, 2024

Perkembangan publikasi terkait topik penelitian *collaborative governance* di Indonesia mengalami jumlah perkembangan yang pesat dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan para peneliti banyak yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *collaborative governance* di Indonesia. Perkembangan publikasi terkait topik *collaborative governance* di Indonesia dari tahun 2018-2023, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah publikasi terbanyak tentang *collaborative governance* di Indonesia ada pada tahun 2023 yaitu sejumlah 20.000. Sedangkan, jumlah publikasi paling sedikit tentang *collaborative governance* di Indonesia yaitu pada tahun 2018 yaitu sejumlah 6.860.

Gambar 1.4

Perkembangan Publikasi Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia



Sumber: Olah Peneliti, 2024

Perkembangan publikasi terkait topik penelitian mitigasi banjir di Indonesia mengalami jumlah perkembangan yang pesat dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan para peneliti banyak yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut

mengenai mitigasi banjir di Indonesia. Perkembangan publikasi terkait topik mitigasi banjir di Indonesia dari tahun 2018-2023, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah publikasi terbanyak tentang mitigasi banjir di Indonesia ada pada tahun 2023 yaitu sejumlah 4.020. Sedangkan, jumlah publikasi paling sedikit tentang mitigasi banjir di Indonesia yaitu pada tahun 2018 yaitu sejumlah 1.260.

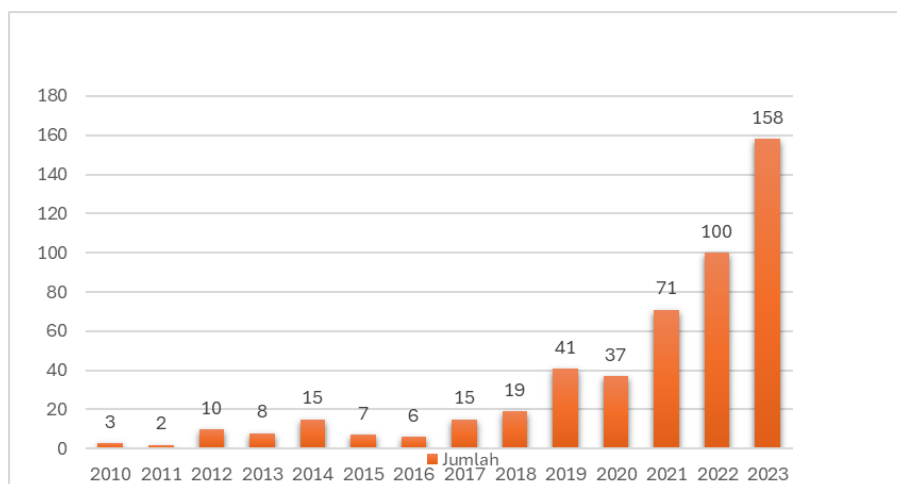
Pasal 44 (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa mitigasi bencana bertujuan untuk melindungi masyarakat di wilayah rentan bencana dengan mengurangi risikonya. Saat banjir mengancam, dibutuhkan strategi mitigasi yang efektif guna melindungi masyarakat, mengurangi kerusakan, dan meningkatkan ketahanan terhadap banjir. Tingginya jumlah informasi mengenai banjir di Indonesia tahun 2024 menuntut pengembangan strategi mitigasi bencana banjir yang bertujuan untuk mengurangi dampak, risiko, dan kerugian akibat banjir. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap banjir di waktu mendatang.

Penting untuk ditekankan bahwa mitigasi berperan penting dalam mengurangi risiko banjir. Hal ini mengharuskan kolaborasi dari semua pihak terkait karena upaya mitigasi dapat mengurangi dampak negatif banjir, meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat serta pihak terkait dalam penanganan insiden. Dengan begitu, dapat membantu mengatasi kerugian manusia, harta benda, dan konsekuensi lain dari banjir (Wicaksono, 2019). Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan sangat penting dalam pelaksanaan mitigasi banjir yang efektif karena tanpa dukungan mereka, upaya tersebut tidak akan berhasil. Dalam pembagian

tanggung jawab penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), lembaga komersial, dan lembaga internasional turut serta bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan penanganan bencana sesuai dengan peran dan fungsinya yang telah ditetapkan.

Penelitian mengenai “Collaborative Governance pada Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia” telah diterbitkan pada platform “Google Scholar” dan mengalami perkembangan yang cukup pesat dari beberapa tahun terakhir. Detail tabel berupa artikel dan jurnal dengan persebaran produksi penelitian sebagai berikut :

Gambar 1.5
Produksi Penelitian Mengenai *Collaborative Governance* Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia



Sumber : Olah Data Peneliti, 2024

Perkembangan publikasi terkait topik penelitian *collaborative governance* mitigasi banjir di Indonesia mengalami jumlah perkembangan yang pesat dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan para peneliti banyak yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *collaborative governance* mitigasi banjir di Indonesia. Perkembangan publikasi terkait topik *collaborative governance* mitigasi di Indonesia dari tahun 2010-2023, setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah publikasi terbanyak tentang *collaborative governance* mitigasi banjir di Indonesia ada pada tahun 2023 yaitu sejumlah 158. Sedangkan, jumlah publikasi paling sedikit tentang *collaborative governance* mitigasi banjir di Indonesia yaitu pada tahun 2011 yaitu sejumlah 2.

Penelitian mengenai *collaborative governance* ditunjukkan pada gambar 1.5 yang diambil dari database *Google Scholar*. Penelitian mengenai *collaborative governance* mitigasi bencana banjir telah banyak dilakukan. Namun, penelitian mengenai struktur perkembangan pengetahuan dengan topik *collaborative governance* mitigasi bencana banjir belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, perlu mengetahui *collaborative governance* mitigasi bencana banjir melalui proses *systematic literature review* sebagai upaya menemukan kebaruan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Collaborative Governance Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia: Systematic Literature Review (SLR) dari Tahun 2018 Sampai 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tren keilmuan *collaborative governance* dalam mitigasi bencana banjir di Indonesia?
2. Dimensi-dimensi *collaborative governance* apa yang didiskusikan dalam mitigasi bencana banjir di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami tren keilmuan yang lebih komprehensif dan lebih mendalam pada topik penelitian *Collaborative Governance* dalam Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia
2. Mendeskripsikan dimensi-dimensi *collaborative governance* yang didiskusikan dalam mitigasi bencana banjir di Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah informasi baik untuk peneliti maupun pihak lain dalam meneliti topik *Collaborative Governance* dalam Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam menambah pengetahuan peneliti dan menjadi bahan masukan kepada aktor terkait *Collaborative Governance* dalam Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI /TAHUN/J URNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE
1	Hasan et al., (2024).	Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi komunikasi bencana yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi bencana menurut Haddow dan Haddow (2008:2)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini itu kualitatif deskriptif, dengan menggunakan model pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi dokumentasi
2	Hasna & Darumurti (2023).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk collaborative governance Pemerintah Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation dalam memitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan.	Penelitian ini berpacu pada teori Edward Deseve menyajikan 8 indikator untuk mengukur keberhasilan collaborative governance	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi
3	Kasiami (2020).	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan	Teori yang digunakan dalam penelitian ini,	Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe

		pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Bojonegoro	yaitu teori George C. Edward III yang meliputi: komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya pelaksana atau implementator, disposisi pelaksana.	deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi.
4	Sihaloho (2022).	Tujuan penelitian ini ialah menganalisis <i>collaborative governance</i> yang dilaksanakan Pemerintah Kota Medan dalam menangani banjir dengan mengacu masalah pokok: bagaimana seharusnya Pemerintah Kota Medan menjalankan <i>collaborative governance</i> yang memadai	Penelitian ini menggunakan teori <i>collaborative governance</i> Ansell & Gash (2008)	Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dalam desain penelitian literature review. Literatur dihimpun secara <i>online</i> dari lima database akademis, meliputi <i>Google Scholar</i> , <i>ResearchGate</i> , DOAJ, SpringerLink, dan ScienceDirect. Data yang terkumpul di analisis secara kualitatif mengikuti langkah-langkah Miles and Huberman
5	Suhindarno (2021).	Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap banjir di Kabupaten Bojonegoro dan juga untuk mengetahui	Penelitian ini menggunakan teori <i>collaborative governance</i> Ansell & Gash (2008)	Metode yang digunakan, yaitu Deskriptif Kualitatif dengan Teknik <i>Purposive Sampling</i>

		Strategi BDBP dalam mitigasi bencana banjir		
6	Utami et al.(2024).	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya mitigasi bencana	Penelitian ini menggunakan teori <i>collaborative governance</i> Ansell & Gash (2008)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi
7	Yulianti (2024).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep adaptive governance dalam penanggulangan bencana banjir dalam Kabupaten Bojonegoro	Penelitian ini menggunakan teori <i>collaborative governance</i> Ansell & Gash (2008)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan tinjauan studi sebelumnya, disimpulkan bahwa mayoritas penelitian membahas tentang kolaborasi pemerintah dalam penanganan bencana. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi bencana, kolaborasi dengan pemerintah merupakan langkah strategis yang diperlukan. Dalam penelitian sebelumnya, kebanyakan mengandalkan teori *collaborative governance* Ansell and Gash (2008) sambil menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi untuk dimensi proses *collaborative governance* dalam upaya Mitigasi Bencana Banjir di Indonesia

dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dalam hal fokus dan lokasi studi. Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah pada mengenai *collaborative governance* sebagai bagian dari usaha Mitigasi Bencana Banjir. Adapun fokus penelitian ini adalah Indonesia.

Berdasarkan temuan dari penelitian terdahulu para peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, seperti yang dilakukan oleh Hasan et al., (2024)., Hasna & Darumurti (2023)., Kasiami (2020)., Sihaloho (2022)., Suhindarno (2021)., Utami et al.(2024)., Yulianti (2024). Penelitian mengenai *collaborative governance* mitigasi bencana banjir di Indonesia sudah banyak dilakukan, namun belum ada yang meneliti mengenai struktur perkembangan pengetahuan dari topik *collaborative governance* mitigasi bencana banjir di Indonesia. Penerapan teknik *Big Data* dalam metode SLR dikombinasikan sebagai upaya untuk mendalami fenomena yang dikaji dan mendapatkan pola atau tren yang dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang mendatang.

Penelitian terdahulu terdapat penggunaan teori yang hampir sama yakni teori *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2008), seperti penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho (2022)., Suhindarno (2021)., Utami et al.(2024)., Yulianti (2024). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman melalui penerapan metode SLR. SLR merupakan cara yang berdasarkan bukti untuk menemukan studi yang relevan terhadap beberapa pertanyaan penelitian yang telah ditentukan dengan cara memilih, menilai, dan menggabungkan temuan guna merespons pertanyaan penelitian tersebut. Keunggulan menggunakan SLR antara

lain beragamnya sumber referensi yang digunakan, relevan untuk berbagai topik, dan memberikan wawasan mendalam yang berguna. Selain itu, proses penulisan *literature review* menjadi lebih efisien dan mudah, memungkinkan pengumpulan data yang besar dengan biaya minimal. Untuk melakukan *literature review*, diperlukan akses ke perpustakaan yang lengkap, *database online*, dan referensi yang terpercaya. *Literature review* dapat dianggap sebagai langkah awal yang penting dalam sebuah proyek atau materi pembelajaran karena membantu dalam mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk studi lebih lanjut.

1.5.2 Administrasi Publik

Secara etimologis istilah administrasi berasal dari kata latin *ad+ministrare* yang berarti melayani, menolong dan memenuhi. Dalam bahasa aslinya dibentuk kata benda administrasi dan kata sifat administrativus. Sekarang menjadi administrasi dalam bahasa Inggris dan administrasi dalam bahasa Indonesia. (Hadari, 1994) Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Administrasi dalam arti sempit, yang berasal dari kata *Administratie* (Belanda), meliputi kegiatan: pencatatan, korespondensi, pembukuan ringan, pengetikan, penyusunan informasi secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan sehingga yang dapat dipergunakan dapat dengan mudah diambil kembali untuk digunakan kembali, baik secara sendiri-sendiri maupun sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang menjadi milik kegiatan dinas teknis.

2. Administrasi dalam arti luas berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris), yaitu:
 - a. Menurut H. A. Simon, “Administrasi adalah aktivitas kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama”.
 - b. Menurut Luther Gulick, “administrasi berkaitan dengan menyelesaikan sesuatu, mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan administrasi negara. Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi yang menjadi salah satu aspek kegiatan pemerintahan. Kasim (1994) mencatat bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya pada tataran perumusan kebijakan tetapi juga pada tataran implementasi kebijakan karena administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan.

Administrasi publik dipandang sebagai pengorganisasian dan pengelolaan unit-unit organisasi yang mengupayakan tercapainya tujuan negara. Tujuan negara meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang publik dan penyelenggaraan pelayanan publik (Kristiadi, 1994), (Waluyo, 2007) mengatakan administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan negara.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Terdapat konsensus tertentu di kalangan para sarjana mengenai pandangan mengenai paradigma pembangunan administrasi publik. Nicholas Henry misalnya, telah beberapa kali merevisi paradigma administrasi publik sejak tahun 1975. Semula ia mengasumsikan empat paradigma pembangunan, namun akhirnya merevisinya dengan kesadaran bahwa paradigma pembangunan administrasi publik ada enam (Henry, 2007).

Pergeseran paradigma administrasi publik menurut Nicolas Henry adalah sebagai berikut:

1. Dikotomi politik dan administrasi (1900-1926)

Tempat, yakni tempat penyelenggaraan negara, paling ditekankan dalam paradigma ini. Sebagai administrasi publik, pemerintah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik mengacu pada fungsi pemerintah dalam membuat undang-undang atau melaksanakan kehendak negara, sedangkan fungsi administratif adalah melaksanakan undang-undang.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Konsep manajemen paling terkenal yang dikembangkan oleh Gullick dan Urwick menyandang akronim POSDCorB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Paradigma ini berfokus pada lebih dari sekedar situs web. Prinsip-prinsip manajemen publik menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut tentunya dapat diajarkan

dalam semua konteks manajemen, apapun jenis kegiatan, konteks, tugas atau struktur kelembagaan indikator perbaikannya.

3. Administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini menekankan pada peran tempat, yang meliputi birokrasi pemerintahan dan kepentingan khusus. Ini mencoba untuk menafsirkan kembali hubungan antara ilmu politik dan administrasi publik.

4. Administrasi negara sebagai manajemen (1954-1970)

Henry menetapkan paradigma keempat “administrasi publik sebagai manajemen”. Periode ini merupakan kemenangan bagi para ilmuwan manajemen yang memperkenalkan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu manajemen. Pada paradigma ketiga dan keempat ini, dua disiplin ilmu yaitu politik dan manajemen bersaing untuk mendapatkan pengakuan bagian keilmuan administrasi publik.

5. Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-sekarang)

Paradigma ini merupakan kritik langsung terhadap paradigma sebelumnya yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh dianggap kecil dalam ilmu politik. Dalam mencari alternatif, ilmu administrasi nampaknya menjadi disiplin pilihan.

6. Governance (1990-sekarang)

Paradigma terakhir ini terkait dengan proses tata kelola pemerintahan saat ini. Tidak hanya pihak-pihak yang berkepentingan atau penguasa saja, namun warga negara dan kelompok sosial juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Ada hubungan antara mereka yang berkuasa

dan sektor lain yang terlibat dalam penyediaan layanan publik. Pemerintah hanya berperan sebagai pengatur dan penyelenggara administrasi publik.

1.5.4 Collaborative Governance

1.5.4.1 Konsep Collaborative Governance

Istilah *Collaborative Governance* merujuk pada pendekatan tata kelola yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif para pemangku kepentingan di luar pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan mendorong dialog terbuka dalam proses pengambilan keputusan bersama, baik dalam perancangan maupun implementasi kebijakan dan program publik (Ansell & Gash, 2008).

Kolaborasi adalah sebuah aktivitas yang pada dasarnya berfokus pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial itu sendiri merupakan interaksi komunikasi yang menghubungkan individu-individu dengan minat yang sama. Dengan merujuk pada ilmu yang telah dipaparkan, kita dapat mengatakan bahwa teori kolaborasi berhubungan erat dengan analisis proses tata kelola, dengan penekanan pada hubungan di dalam jaringan sosial. Dalam memodelkan tata kelola kolaboratif, penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam suatu dialog, di mana setiap pemangku kepentingan mewakili kepentingan mereka masing-masing selama proses mediasi (Booher, 2002).

Pentingnya kolaborasi pemerintah berfokus pada kebijakan dan isu-isu yang berkaitan dengan publik. Institusi publik berkonsentrasi pada pengambilan kebijakan dengan penekanan pada tujuan dan proses kolaborasi untuk mencapai

konsensus di antara para pemangku kepentingan. Tata kelola kolaboratif mendukung terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Hardi, 2020). Kolaborasi merupakan sebuah gagasan yang mencerminkan upaya untuk memfasilitasi dan melibatkan banyak organisasi dalam mengatasi permasalahan yang rumit dan sulit diselesaikan hanya pada satu organisasi (Sudarmo, 2015). Kolaborasi adalah ketika dua atau lebih institusi bekerja sama untuk meningkatkan “nilai publik” dibandingkan bekerja secara terpisah (Sudarmo, 2015).

Tata kelola kolaboratif adalah serangkaian perjanjian di mana lembaga-lembaga publik, baik satu atau lebih, bekerja secara langsung dengan kelompok kepentingan non-negara untuk menetapkan kebijakan resmi yang dilaksanakan secara konsensus dan konsultatif, dengan tujuan menciptakan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengatur program atau program publik (Ansell & Gash, 2008).

Tata kelola kolaboratif merupakan suatu sistem yang terintegrasi, mengelola hubungan yang berjalan melintasi batas-batas organisasi, baik formal maupun informal. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi yang telah disusun ulang dan dilengkapi dengan definisi keberhasilan yang jelas (Sudarmo, 2015). Kolaborasi dalam tata kelola kolaboratif tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan baik dari sudut pandang negara maupun non-negara, namun juga mencakup konsep “tata kelola multi-mitra” yang mencakup sektor swasta, masyarakat, dan komunitas sipil. Hal ini didukung oleh sinergi peran dan perencanaan yang memadukan pendekatan *hybrid*, serupa dengan kolaborasi antara

sektor publik, swasta, dan sosial. Tata kelola kolaboratif merupakan suatu proses dan struktur dalam manajemen dan pengambilan keputusan kebijakan, yang di dalamnya pihak-pihak dari berbagai tingkatan terlibat secara konstruktif, termasuk lembaga pemerintah, lembaga publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mencapai hasil yang tidak mungkin dicapai jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja (Subarsono, 2012).

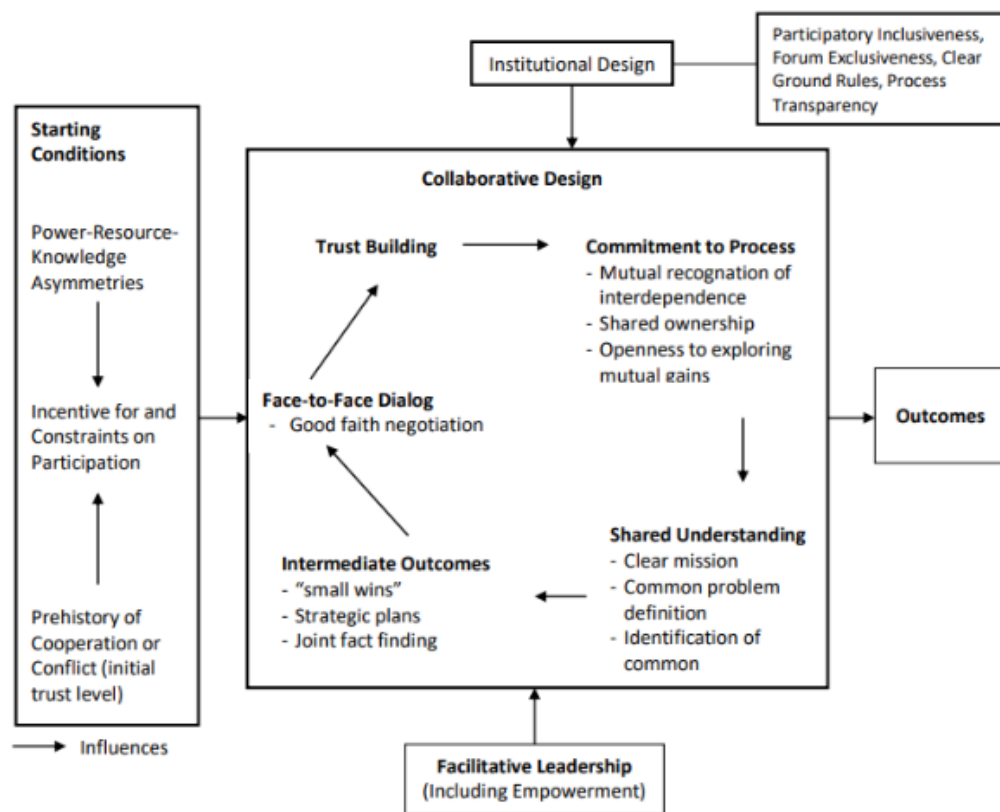
Tata kelola kolaboratif merupakan proses kolektif dan egaliter di mana seluruh partisipan mempunyai otoritas pengambilan keputusan dan seluruh partisipan mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan keinginannya. Bovaird menjelaskan, kemitraan antara pemerintah dan swasta merupakan perjanjian kerja sama yang didasarkan pada komitmen saling mendukung yang melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak apa pun antara lembaga publik dan mitra sektor swasta (Hardi, 2020).

Pada penerapan *Collaborative Governance* tentu ada faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan kolaborasi, namun ada juga faktor-faktor yang dapat menghambatnya. Menurut (DeSeve, 2007), ada delapan (8) elemen yang diperhatikan dalam untuk faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi (Deseve, 2007), ada 8 (delapan) elemen diantaranya:

1. *Networked Structure* (struktur jaringan)
2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)
3. *Trust Among The Participants* (Kepercayaan)
4. *Governance*

5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan),
6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas),
7. *Information Sharing* (Berbagi Informasi),
8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)

Gambar 1.6
Model Collaborative Governance Menurut Ansell & Gash



Sumber : Model of Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008)

Model *Collaborative Governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) terdiri atas beberapa tahap, yaitu :

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif Ryan dalam Ansell dan Gash mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu :

- a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi
- b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis
- c. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

3. Desain institusional (Institutional Design)

Ansell dan Gash mendeskripsikan bahwa Desain Institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

4. Proses Kolaborasi (Collaborative Process)

Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut :

- a. Dialog tatap muka (Face to face)

- b. Membangun kepercayaan (Trust Building)
- c. Komitmen terhadap proses (Commitment to process)
- d. *Share Understanding*
- e. Hasil Sementara

1.5.4.2 Perkembangan *Collaborative Governance*

Munculnya *collaborative governance* terjadi saat paradigma pemerintahan bergeser karena evolusi masyarakat menyebabkan pemerintah dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Dari sisi lain, pemerintah juga memiliki batasan waktu dalam menuntaskan masalah ini sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pihak luar (Ansell, 2007) mencatat bahwa tata kelola kolaboratif merupakan strategi terbaru dari pemerintah yang menggabungkan berbagai pihak yang terlibat dalam forum yang sama untuk mencapai kesepakatan bersama. Terlebih lagi, Ansel dan Gash merumuskan konsep manajemen kooperatif sebagai sebuah tata kelola manajemen di mana satu atau beberapa lembaga publik terlibat secara langsung dengan pihak non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan resmi, yang didasarkan pada kesepakatan, dan melibatkan konsultasi dengan tujuan menciptakan atau melakukan layanan publik. Politik yang mengatur program atau harta publik.

Definisi dari (Ansell, 2007) menekankan enam kriteria. Forum ini bermula dari inisiatif badan publik. Selanjutnya, yang ikut serta di forum haruslah berasal dari kalangan non-pemerintah. Ketiga, aktor perlu secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar "berkonsultasi" dengan pemerintah.

Keempat, forum perlu diatur dengan cara yang formal dan diadakan pertemuan reguler. Kelima, politik harus berasaskan muafakat dan seterusnya, kerjasama perlu difokuskan kepada dasar-dasar awam atau pentadbiran awam (Ansell, 2007).

Collaborative governance merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menangani masalah tersebut. Kolaborasi dalam tata kelola adalah cara yang efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan karena memberikan perasaan kepemilikan bersama atas masalah tersebut. Setiap aktor memiliki sudut pandang yang unik ketika membahas permasalahan mereka. Menciptakan konsensus antar peran seorang aktor merupakan hal yang tidak mudah. Kerjasama atau collaborative governance berfungsi sebagai perantara untuk memastikan semua peserta memiliki pemahaman yang seragam terhadap permasalahan yang ada (Ansell, 2014).

Collaborative governance adalah suatu platform yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut (Donahue, 2011) kolaboratif dalam pemerintahan merujuk pada situasi di mana pemerintah bekerja sama dengan organisasi dan individu untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Kolaborasi pemerintahan juga dapat mencerminkan hubungan saling membutuhkan antara berbagai pihak. Keinginan untuk mengatur tata kelola kooperatif timbul ketika para peserta menyadari keterbatasan yang dimiliki oleh mereka. Kemudian para aktor tersebut perlu mengutarakan keinginan dan keinginan mereka untuk mempererat hubungan dengan aktor lain. Setiap aktor yang terlibat perlu menghormati kedudukan yang sah dari aktor lain. Apabila peserta sepakat untuk bekerjasama dengan sungguh-

sebenarnya, penting untuk membangun rasa memiliki bersama terhadap segala proses kerjasama yang dilakukan (Ansell, 2014).

Berdasarkan pandangan ahli yang beragam, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* adalah proses kerjasama multiorganisasi lintas sektoral yang merumuskan kesepakatan bersama, mengambil keputusan secara bersama-sama, serta mencapai kesepakatan melalui komunikasi formal dan informal. Tujuannya adalah menciptakan serta mengembangkan standar interaksi yang saling menguntungkan demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, interaksi yang terjadi melalui perpaduan bersifat merata, di mana status semua pihak sejajar.

1.5.5 Mitigasi Bencana

Dampak dari terjadi bencana sangat dirasakan oleh masyarakat, baik dari segi korban yang merugi jiwa, harta, maupun kerusakan lingkungan yang disebabkan. Agar hal tersebut dapat diatasi dengan baik, konsep mitigasi bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil guna mengurangi dampak buruk yang muncul (Yuhanah, 2014). Mitigasi merupakan rangkaian langkah yang dilakukan guna mengurangi kemungkinan terjadinya bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur fisik maupun upaya peningkatan kesadaran dan kapabilitas dalam menghadapi situasi yang membahayakan dari bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang dirancang untuk mengurangi potensi risiko bencana. Upaya ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur fisik, pendidikan masyarakat, serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi berbagai ancaman

bencana. Dalam konteks mitigasi, penting untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai langkah-langkah yang harus diambil dan lokasi pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka program pengurangan risiko (Susanti & Anggara, 2021). Kegiatan mitigasi bertujuan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko dalam jangka panjang. Upaya ini dilakukan untuk menekan jumlah korban serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan secara optimal. Dengan demikian, kita dapat berpikir dan bertindak secara efektif ketika menghadapi situasi darurat (Hayudityas, 2020).

Berdasarkan pengertian mitigasi bencana di atas, dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejadian bencana guna mengurangi risiko jangka panjang, meliputi persiapan dan upaya pencegahan. Dengan begitu, langkah-langkah mitigasi atau manajemen bencana menjadi suatu tindakan yang perlu dilakukan.

1.5.6 Kaitan *Collaborative Governance* dan Mitigasi Bencana dengan 6

Dimensi Administrasi Publik

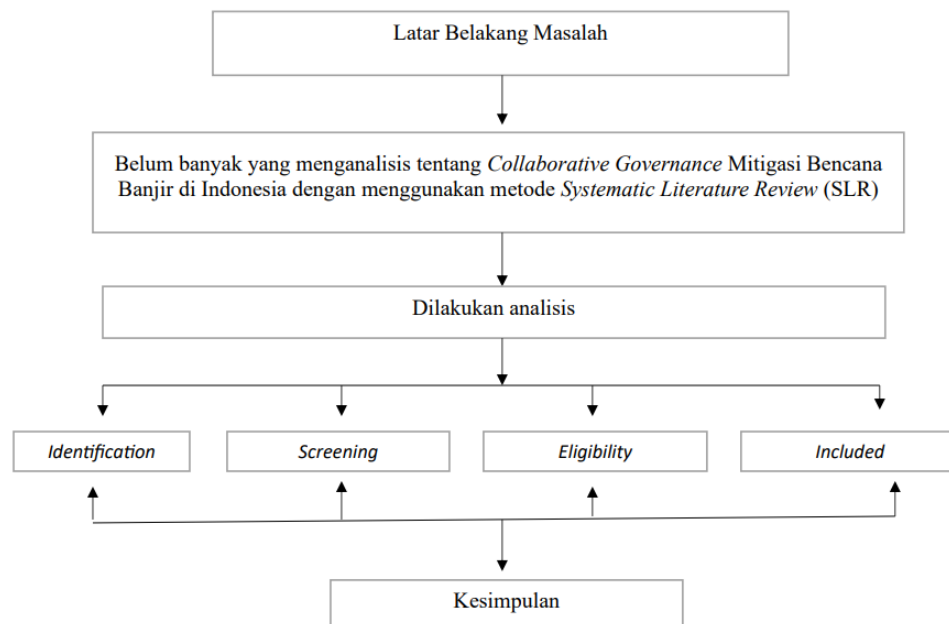
Dalam pandangan administrasi publik, kolaborasi adalah proses bekerja bersama dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam suatu aktivitas guna mencapai sasaran yang diinginkan. Sah tentu juga pendapat itu dengan makna dari administrasi, yakni kerja sama antara dua orang atau lebih demi mencapai tujuan (Warsono, 2020).

Upaya memahami peran kerjasama dalam konteks administrasi publik, perlu untuk mengamati konsep tersebut dari berbagai sudut pandang ilmiah. Dalam dunia administrasi publik, sering kali kita menggunakan istilah governance untuk menggambarkan hubungan antar berbagai organisasi yang terlibat. Pengertian tentang governance tak hanya sebatas keterlibatan lembaga publik dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melainkan juga sejalinannya berbagai organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik (Warsono, 2020).

Berdasarkan informasi yang telah disebutkan sebelumnya, kolaborasi dapat diterapkan di sektor publik. Keterbatasan pemerintah sebagai pelayan publik dalam mencapai tujuan atau hasil yang optimal perlu bekerja sama dengan pihak lain demi mencapai hasil yang terbaik. Kita menyadari bahwa kolaborasi terjadi karena adanya kebutuhan antara organisasi dalam menangani permasalahan atau kegiatan tertentu (Warsono, 2020).

1.6 Kerangka Penelitian

Gambar 1.7
Kerangka Pemikiran



Sumber : Olah Peneliti, 2024

Indonesia merupakan negara yang terletak di Cincin Api Pasifik, sehingga menyebabkan Indonesia rawan terjadi bencana. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang topik *collaborative governance* mitigasi bencana banjir di Indonesia. Namun, belum ditemukan peneliti yang melakukan penelitian mengenai struktur perkembangan pengetahuan tentang *collaborative governance* mitigasi bencana banjir di Indonesia. Pemanfaatan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dalam *collaborative governance*, terutama dalam mitigasi bencana, memberikan banyak keuntungan untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan,

sehingga peneliti memilih untuk menggunakan metode ini. Oleh karena itu, dilakukanlah analisis dengan langkah-langkah yang terstruktur. Identifikasi mencakup jumlah data yang diidentifikasi dan data pendukung dalam pencarian database. Penyaringan melibatkan pemilihan atau penyaringan data yang akan digunakan. Kelayakan mencakup data yang memenuhi persyaratan masuk. Termasuk menganalisis data yang dimasukkan untuk menarik kesimpulan penelitian.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *System Literature Review* (SLR) dengan data kualitatif dan merupakan penelitian sekunder berdasarkan sumber data yang diperoleh. Analisis data deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan akurat tentang suatu fenomena. *System Literature Review* (SLR) dipilih sebagai langkah untuk mengumpulkan data berkualitas tinggi dari berbagai sumber.

1.7.2 Jenis dan Sumber Data

Data sekunder dipilih peneliti untuk memperoleh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung, namun diperoleh melalui artikel yang telah terpublikasi dalam jurnal nasional dan internasional ternama dengan topik tertentu. *Database Google Scholar* digunakan untuk pencarian literatur dalam tinjauan literatur ini. Mesin pencari tersebut digunakan untuk mencari artikel yang

diterbitkan dengan menggunakan kata kunci berbahasa Inggris, yaitu *collaborative governance*, *collaborative actor*, *governance participation*, *disaster mitigation* dan kriteria inklusi dan eksklusi. Jawaban dari permasalahan atau *research question* (RQ) diperoleh dari proses pencarian yang digunakan untuk memperoleh sumber-sumber yang relevan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

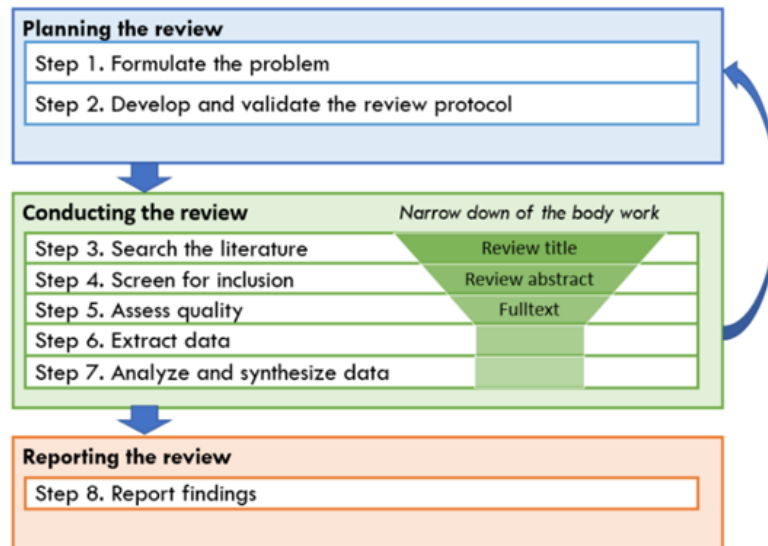
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sistematika literatur review (SLR), yaitu metode yang mengkaji topik pembahasan tertentu yang diidentifikasi dan disusun untuk dikategorikan, dievaluasi, disimpulkan, dan dipilih berdasarkan tolok ukur yang telah ditentukan berdasarkan bukti dan fakta penelitian kualitatif. Pertanyaan penelitian tinjauan pustaka meliputi uraian teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diambil dari bahan referensi yang mendasari kegiatan penelitian. Tujuan dari uraian tinjauan pustaka ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja yang jelas untuk memecahkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam rumusan masalah.

Tinjauan pustaka merupakan sebuah ikhtisar yang menyajikan ringkasan serta analisis penulis dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan, seperti artikel, buku, presentasi, dan informasi dari internet, terkait dengan topik yang dibahas. Bagian ini biasanya disertakan dalam bab pertama penelitian. Selain itu, hasil penelitian dari peneliti lain dapat dimasukkan untuk perbandingan dengan temuan yang dihasilkan. Penting untuk mencantumkan segala pernyataan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis, serta merujuk pada sumber-sumber tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Tinjauan literatur yang baik harus

relevan, mutakhir (dari tiga tahun terakhir), dan sesuai dengan topik. Tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah untuk memberikan dukungan konseptual dan teoritis bagi laporan penelitian, jurnal akademik, artikel penelitian, dokumen tertulis, atau karya-karya lain yang mendukung penelitian lebih lanjut.

Data dari artikel literatur yang telah memiliki ISSN (International Standard Serial Number) atau ISSN elektronik digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Mesin pencari *Publish Or Perish* versi 1.19.8 yang diakses melalui *Google Scholar* digunakan untuk mencari informasi. Ini menawarkan metode sederhana untuk mencari artikel penelitian ekstensif dan merupakan database publikasi terbesar. "*collaborative governance*" OR "*collaborative actor*" OR "*governance participation*" AND "*disaster mitigation*" AND "*flood*" AND "*Indonesia*" menjadi kata kunci pada string pencarian. Fokus objek penelitian ini adalah *Collaborative Governance* dalam Mitigasi Bencana Banjir dengan kriteria inklusi dan eksklusi, di mana informasi yang dikelompokkan berdasarkan penelitian meliputi artikel-artikel yang digunakan pada periode 2018-2023 dan literatur yang ada hanya berupa artikel atau artikel terkait mitigasi banjir.

Gambar 1.8
Tahapan Melakukan Studi Literatur Sistematis



Sumber : (Xiao & Watson, 2019)

Gambar 1.8 tersebut memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan penelitian melalui tinjauan pustaka dan menjadi acuan perancangan metode penelitian ini, yang akan dibahas lebih rinci pada bagian selanjutnya. Tahapan tinjauan literatur dalam sistem terdiri dari tiga tahap utama: 1) Perencanaan, di mana peneliti menetapkan perlunya tinjauan, menentukan pertanyaan penelitian, dan mengembangkan protokol penelitian untuk memandu pelaksanaan tinjauan dan mengurangi kemungkinan bias peneliti; 2) Eksekusi, yaitu peneliti mengidentifikasi dan memilih penelitian yang paling relevan, menentukan strategi pencarian, mengedit pilihan penelitian dengan kriteria inklusi dan eksklusi, menilai kualitas, mengekstraksi, menganalisis, dan merangkum data; dan 3) Pelaporan, yaitu peneliti menulis laporan untuk menyebarkan temuannya dari tinjauan pustaka. Meskipun prosedur untuk berbagai jenis tinjauan pustaka berbeda, semua tinjauan dapat

dilakukan dalam delapan langkah umum: (1) merumuskan masalah penelitian; (2) mengembangkan dan memvalidasi protokol peninjauan; (3) penelusuran literatur; (4) penyaringan untuk dimasukkan dalam penelitian dengan meninjau abstrak; (5) menilai kualitas karya sastra dengan membaca teks lengkap; (6) ekstraksi data; (7) analisis dan sintesis data; dan (8) menulis laporan temuan (Xiao & Watson, 2019).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis (SLR) yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis penelitian-penelitian yang dipublikasikan mengenai penerapan *collaborative governance* di Indonesia. Penggunaan studi literatur atau tinjauan literatur yang sistematis dipilih sebagai langkah untuk mengumpulkan data berkualitas tinggi dari berbagai literatur. Jenis penelitian ini dapat mengungkap pola dan struktur dalam penelitian serta mengidentifikasi kesenjangan yang dapat diisi oleh penelitian selanjutnya.

1.7.4.1 Strategi Pencarian

Literatur ilmiah untuk penelitian ini ditinjau bekerja sama dengan database utama *Google Scholar*. *Google Scholar* dipilih karena menyediakan informasi jurnal ilmiah, artikel ilmiah, buku, event dan topik lainnya. *Google Scholar* adalah salah satu database yang menyediakan indeks artikel jurnal yang andal dan sering diperbarui untuk tujuan penelitian. Basis data ini juga dipilih karena keterbukaan sumber yang tersedia bagi peneliti. Istilah bahasa Inggris digunakan untuk kata kunci dalam pencarian literatur karena memiliki jangkauan yang luas dan untuk menemukan artikel yang berkualitas tinggi dan terindeks. Alasan penggunaan

istilah bahasa Inggris juga karena ruang lingkup penelitiannya bersifat global. Pengertian string pencarian atau kumpulan kata kunci sebagai mesin pencari artikel.

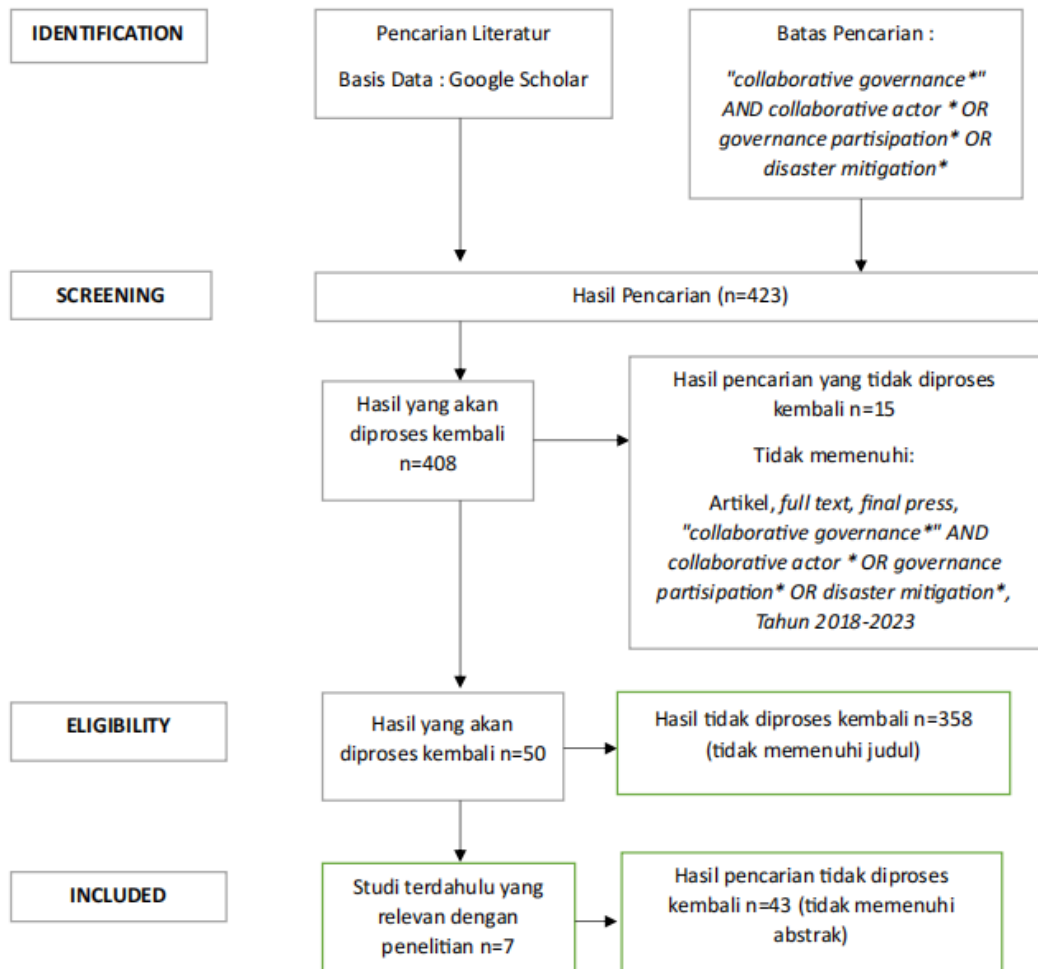
Kata kunci "*collaborative governance*" disandingkan dengan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan maupun kata lain dari kebencanaan, meliputi "*collaborative governance*" OR "*collaborative actor*" OR "*governance participation*" AND "*disaster mitigation*" AND "*flood*" AND "*Indonesia*". Penggunaan boolean operators dalam pencarian literatur ini kemudian disatukan dalam search string berikut,

"collaborative governance" OR "collaborative actor" OR "governance participation" AND "disaster mitigation" AND "flood" AND "Indonesia"

Pada fase ini ditemukan 423 publikasi ilmiah yang kata kuncinya disebutkan. Penapisan dengan kriteria inklusi dan eksklusi dilakukan untuk menemukan artikel yang memenuhi tujuan penelitian dan mendalami *collaborative governance* mitigasi bencana banjir.

Gambar 1.9

Diagram PRISMA Flowchart



Sumber : Olah Peneliti, 2024

Pada tahap ini artikel terpilih digunakan untuk menjamin kelengkapan isi artikel yang diterima. Skema pencarian artikel jurnal menggunakan flowchart dengan pedoman PRISMA untuk menyaring artikel yang akan direvisi.

1.7.4.2 Penentuan Inklusi dan Eksklusi

Kriteria yang digunakan dalam artikel ini untuk pemilihan literatur berfungsi untuk mengecualikan atau menyertakan artikel yang ditemukan pada langkah sebelumnya. Hanya artikel yang mengandung kata kunci “collaborative governance” yang dimasukkan dalam literatur. Sebaliknya, artikel-artikel yang berhubungan dengan privatisasi bencana tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan pada bagian sebelumnya telah dijelaskan latar belakang bahwa pengelolaan *collaborative governance* dan privatisasi berbeda dalam hal distribusi risiko dan tanggung jawab pelaksanaan program.

Tabel 1.3
Ketentuan Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Ketersediaan Literatur	Artikel dengan teks lengkap	Artikel dengan teks tidak lengkap
Kata Kunci	<i>"collaborative governance"</i> <i>OR "collaborative actor"</i> <i>OR "governance participation" AND "disaster mitigation" AND "flood" AND "Indonesia"</i>	-
Tahap Publikasi	<i>Final Press</i>	<i>Article in Press</i>
Tipe Dokumen	<i>JOURNAL</i>	<i>Book, Book Conference, Book Chapter</i>

Sumber : Olah Peneliti, 2024

Pencarian menggunakan kategori inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan menghasilkan 423 artikel, yang kemudian direview kembali relevansinya dengan tujuan penelitian. Seleksi artikel selanjutnya melalui tahapan pemeriksaan judul dan abstrak serta review artikel secara lengkap. Pada fase ini, artikel dibaca secara

cermat untuk mengetahui isi penelitian dan relevansinya dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Terlepas dari kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan. Kriteria utama dalam mengkaji judul dan abstrak adalah dengan mempertimbangkan hanya literatur yang membahas artikel yang memberikan contoh kasus tata kelola kolaboratif dalam pengurangan risiko bencana di suatu negara dari berbagai perspektif. Analisis terhadap perkembangan teoretis atau konsep terkait tata kelola kolaboratif dalam mitigasi bencana banjir yang tidak berhubungan dengan proyek aktual atau proyek yang dilaksanakan tidak disertakan. Selain mengulas topik ini, ketersediaan teks secara keseluruhan juga ditinjau. Kajian tersebut menemukan 7 artikel dari tahun 2018 berdasarkan tinjauan pertama mengenai tata kelola kolaboratif dalam PRB hingga tahun 2023. Ketujuh artikel tersebut kemudian dianalisis untuk tinjauan literatur sistematis ini.

1.7.4.3 Ekstraksi dan Visualisasi Data

Pada tahap ini dilakukan pemetaan jurnal yang meliputi tren tahun penelitian, jurnal yang relevan dengan topik, penulis dan makalah yang paling sering digunakan dalam bentuk diagram dan data. Hasil publikasi dokumen dikumpulkan melalui *Google Scholar*. *Microsoft Exce* dan *VosViewers* digunakan sebagai alat untuk ekstraksi dan visualisasi data. Hasil analisis mengikuti tren data yang diamati selama proses perhitungan, dan pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat menggunakan *Excel* dan *VosViewers*, termasuk pembuatan diagram dan grafik untuk visualisasi data. Melalui visualisasi data menggunakan *Microsoft Excel* dan *VosViewers*, informasi yang diperoleh dapat menunjukkan pola dan tren *Collaborative Governance* di Indonesia serta dimensi-dimensinya.